

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dibawah ini adalah penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti lain sehubungan dengan topik bahasan yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

Penelitian ini dilakukan oleh Nurillah, (2014) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok).” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada variabel independen.

Penulis meneliti tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, sedangkan peneliti meneliti Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi,

dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok.

Penelitian ini dilakukan oleh Budiyanto (2018) yang menyatakan bahwa secara Audit Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dengan hasil atau sebesar 47,9%. Angka tersebut berarti bahwasebesar 47,9% berpengaruh cukup kuat. Semakin baiknya auditinternal dalam pengawasan Laporan Keuangan akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Komarasari (2016) dalam penelitiannya menggunakan variabel independen Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi sedangkan variabel dependennya yaitu Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul dengan responden kepala dan staf bagian akuntansi keuangan dengan menggunakan *survey* kuesioner.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2014) dengan variable dependen Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan variabel independennya yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 20 bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dengan menyebar kuesioner dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah struktur organisasi SKPD Kabupaten Gianyar dan gambaran umum Kabupaten Gianyar.

Penelitian Yuliani dan Agustini (2016) bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemahaman atas regulasi Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner pada pegawai SKPD Kabupaten Bandung yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah dengan analisis regresi linier berganda.

Menurut Peneliti Dachi, Erlina, Bukit (2019) dengan judul *“Analysis of factors affecting the quality of financial statements using information technology as moderated variables in the government of the south nias regency.”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penggunaan teknologi informasi mampu melemahkan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di Nias Selatan. pemerintah kabupaten.

Menurut Peneliti Irafah, Sari, Muhyaraya (2016) dengan judul *“The effect of competence of human resources and the internal audit role of the quality of financial statements (study in the provincial and regency/city government of north sumatra).”*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kompetensi SDM dan peran audit internal tidak secara parsial mempengaruhi keberhasilan penerapan SIKD (2) kompetensi SDM, Peran Audit Internal tidak berpengaruh secara simultan terhadap Keberhasilan Aplikasi SIKD (3) kompetensi sumber daya manusia dan peran audit internal berpengaruh parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut peneliti Rahman, Radri (2016) dengan judul *“Region’s financial accounting information system and the quality of local government financial report.”* . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurillah dan Muid (2014)	Komptensi SDM, SAKD, Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas LKPD	X ₁ : Kompetensi SDM X ₂ : SAK X ₃ : Pemanfaatan Teknologi X ₄ : Pengendalian Intern Y : Kualitas LKPD	Kompetensi SDM, penerapan SAK, pemanfaatan teknologi informasi, system pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

(Lanjutan)

Tabel 2.1

2	Komarasari (2016)	Kapabilitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	X ₁ : SDM X ₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi X ₃ : Pengendalian Intern Akuntansi Y : Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan.
3.	Aida Nahar, Suabdryah dan Ali Sofwan, (2017)	Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas LKPD.	X ₁ : SDM X ₂ : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y : Kualitas LKPD	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

(Lanjutan)

Tabel 2.1

4.	Desi Sefri Yensi, (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas LKPD	X1 : SDM X2 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X3 : Sistem Pengendalian Intern	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas LKPD
5.	M.Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. Sri Pancawati Martiningsih, (2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.	X ₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah X ₂ : Kompetensi Aparatur X ₃ : Peran Audit Internal Y : Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah , Kompetensi Aparatur, Peran Internal Audit memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai variable moderating.

(Lanjutan)

Tabel 2.1

6	Hari Bagja (2018)	The Influence of internal control audit regional financial accounting system on the quality of <i>Financial statement in BPKAD Bandung City</i>	X ₁ : <i>The influence of internal control audit regional</i> X ₂ : <i>Financial accounting system.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah.
7	Dewi Indriasih and Poppy Sofia Koeswayo (2014)	<i>The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toward The Quality Of Financial Reporting And Its Impact On</i>	X ₁ : <i>The Goverment Apparatus Competence</i> X ₂ : <i>The Effectiveness Of Government Internal Control</i> X ₃ : <i>The Quality Of Financial Reporting</i>	berpengaruh signifikan terhadap <i>The Quality Of Financial Reporting</i> tidak berpengaruh terhadap <i>The Performance Accountability</i> (0,681).

(Lanjutan)

Tabel 2.1

		<i>The Performance Accountability In Local Government</i>	<i>Y : Performance Accountability In Local Governen</i>	
8	Ingrid Panjaitan (2016)	<i>Competence Of Human Resources And The Government Internal Control System (SPIP) And The Effect On The Financial Statement Quality Of Public Service Agenxycy (BLU) Moderated By Government Accounting Standart (SAP).</i>	<i>X₁ : Competence Of Human Resources X₂ : The Government Internal Control System X₃ : The Effect On The Financial Statement Quality Of Publick Service Agenxycy</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komptensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Periode dan Objek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota DKI Jakarta dengan responden kepala dan staf bagian akuntansi keuangan dengan menggunakan *survey* kuesioner. Penelitian dilakukan pada tahun berbeda dengan penelitian sebelumnya.

2. Variabel Penelitian

Variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Laporan Keuangan

2.2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015:1) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam sebuah lembaga pemerintah dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan *surplus* defisit, laporan realisasi

anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Menurut PSAK No. 1 (2015:1) laporan keuangan adalah Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Menurut (Rahmadani, 2015 : 124) tujuan umum suatu laporan keuangan khususnya pada laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja suatu entitas dalam proses pelaporan yang dapat digunakan oleh semua pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Menurut (Muhardi, 2013: 172) laporan keuangan adalah Laporan keuangan dapat diibaratkan sebuah peta yang berguna bagi pihak-pihak yang sedang melakukan perjalanan. Dengan melihat pada peta yang ada, maka pihak yang sedang melakukan perjalanan tersebut dapat mencapai tujuan akhir dengan cara yang tepat dan tidak tersesat ditengah perjalanan. Pengguna dari laporan keuangan sendiri adalah manajemen, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2.2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat bagi para pemakainya jika laporan keuangan tersebut mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. laporan keuangan yang berkualitas tentunya memiliki kriteria tersendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut bersifat relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Dalam penelitiannya (Rahmadani, 2015 : 124) mengatakan bahwa Semua karakteristik tersebut merupakan salah satu prasyarat normatif yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas, yaitu

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna ataupun manajerial. Informasi tersebut juga digunakan untuk membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa yang akan datang, dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud dari penggunaan.

2. Andal

Keandalan suatu informasi dalam laporan keuangan artinya bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan yang material. Fakta dalam informasi harus disajikan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

3. Dapat dipahami

Suatu informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat apabila informasi yang disajikan mudah untuk dipahami pengguna laporan keuangan.

Informasi yang disajikan dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dan pengetahuan pengguna.

4. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dalam laporan keuangan dikatakan bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis. Perbandingan dapat dilakukan dengan cara internal maupun secara eksternal. Perbandingan dengan cara internal dapat dilakukan bila suatu entitas dari tahun ke tahun menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang sudah ditetapkan dalam PP Nomor 71 tahun 2010, itu berarti pemerintah daerah sudah mampu untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus menghasilkan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila belum sesuai dengan perundang-undangan, maka bisa saja mengakibatkan kerugian daerah yang besar, kelemahan suatu administrasi, pemborosan yang luar biasa, waktu yang tidak efisien dan efektif.

2.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.2.2.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangatlah dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan. Sumber Daya Manusia merupakan suatu acuan dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas karena seseorang yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang sudah menguasai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut Indriasih (2014 : 8) Sumber Daya Manusia adalah Pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Suatu sistem yang baik tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Menurut Nawawi (2014 : 44) dalam Gaol,, Sumber Daya Manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif), dan SDM merupakan potensi yang menjadi penggerak organisasi.

Menurut Sutrisno (2014 : 44), sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akan perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa sumber daya manusia adalah

aset terpenting di sebuah organisasi yang membantu organisasi untuk beroperasi dan mencapai tujuan.

2.2.3 Sistem Pengendalian Internal

2.2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2013: 163) pengendalian internal adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kenadalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Hery (2013 :160) pengertian pengendalian internal adalah Seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjadmin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan uang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Menurut Romney dan Steibart (2014 : 204) pengendalian internal adalah suatu proses karena termasuk didalam aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan pengelolaan. pengendalian internal

memberikan jaminan yang lengkap dan wajar untuk sulit dicapai. Selain sistem pengendalian intern memiliki keterbatasan, seperti kerentanan terhadap kesalahan sederhana, penilaian yang salah dan pengambilan keputusan, mengabaikan manajemen dan terjadinya kolusi.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemahaman yang dibuat dan diterapkan berdasarkan logika akuntansi apabila mengalami kegagalan yang dilakukan oleh sumber daya manusia di pemerintah daerah akan memiliki pengaruh buruk. Hal ini berupa kesalahan keliru di dalam laporan keuangan karena tidak sesuai dengan SOP yang diatur pemerintah Warisno (2015). Berdasarkan hal tersebut, serupa dengan riset yang dikerjakan Botutihe (2015) berjudul Pengaruh Penerepan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Gorontalo.

H1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.3.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kompetensi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sesuai kapasitasnya, yaitu kompetensi perseorangan, badan atau lembaga, atau peraturan dalam menjalankan tugas sesuai wewenang. Berdasarkan hal tersebut serupa

dengan riset terdahulu yang disusun Roviyantie (2015) berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerepan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dari hasil penelitian yang telah dibuat bahwa laporan keuangan daerah dapat berkualitas jika kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki baik. Hal ini penting dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat diandalkan.

H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem yang digunakan untuk mengendalikan internal yang saling berkoordinasi dalam melindungi aset organisasi, memeriksa dengan teliti dan keandalan transaksi akuntansi. Berdasarkan penjelasan di atas, memiliki kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah serangkaian pekerjaan dalam membuat kebijakan yang dibuat oleh individu berwenang dalam membuat jaminan mencapai kemangkusan dan kesangkilan kegiatan, laporan keuangan yang dapat diandalkan sesuai kebijakan yang berlaku Mulyadi (2014:163).

H3 : Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Secara teknis, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Berdasarkan variabel yang ada dalam penelitian ini, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

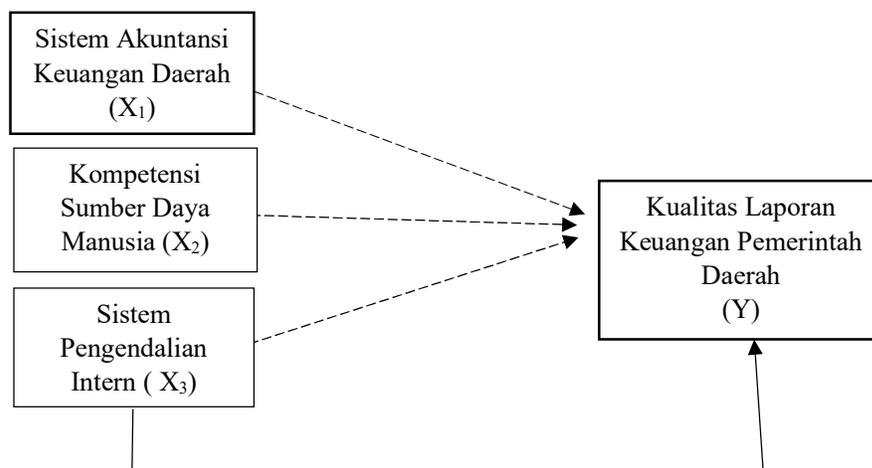
H_1 = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota DKI Jakarta berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan

H_2 = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota DKI Jakarta berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia

H_3 = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota DKI Jakarta berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Sistem Pengendalian Intenal

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas perlu adanya kerangka konseptual yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran suatu penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1

Skema Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

-----> : Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

————> : Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Rumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.